

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Meningkatnya jumlah penduduk turut memberikan dampak terhadap lingkungan. Permasalahan lingkungan kerap kali kurang mendapatkan perhatian, salah satunya adalah masalah sampah. Naiknya kuantitas sampah dipengaruhi oleh adanya meningkatnya jumlah penduduk dan pola konsumsi masyarakat. Menurut Undang-Undang No 18 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah, sampah memiliki arti sebagai bahan yang tersisa di kegiatan sehari-hari manusia dan juga hasil alamiah berbentuk padat. Indonesia menjadi negara kedua penyumbang sampah terbesar di dunia setelah negara China mengenai polusi plastik (Jambeck, et al., 2015). Jumlah rata-rata produksi sampah di Indonesia mencapai 175.000 ton per hari atau setara dengan 64 juta ton per tahun. Jika di konversikan produksi sampah setiap orang sekitar 0,7 kg per hari (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi KLHK, 2019). Semakin besar jumlah penduduk atau tingkat konsumsi terhadap barang maka semakin besar pula volume sampah yang dihasilkan (Sucipto, 2012).

Menurut Sejati (2009) secara garis besar jenis sampah dapat diberdakan menjadi tiga golongan, yaitu :

1. Sampah organik/basah, sampah yang berasal dari makhluk hidup, seperti daun-daunan, sampah dapur, sampah restoran, sisa sayur, sisa buah, dan lain-lain. Sampah jenis ini dapat terdegradasi (membusuk/hancur) secara alami.
2. Sampah anorganik/kering, sampah yang tidak dapat terdegradasi secara alami. Contohnya adalah logam, besi, kaleng, plastik, karet, botol, dan lain-lain.

3. Sampah berbahaya, sampah jenis ini berbahaya bagi manusia. Contohnya adalah baterai, jarum suntik bekas, limbah racun kimia, limbah nuklir, dan lain-lain. Sampah jenis ini memerlukan penanganan khusus.

Tabel 1.1 Komposisi sampah berdasarkan jenis sampah di Indonesia

Jenis Sampah	Jumlah Sampah (%)
Sisa Makanan	41.79%
Kayu Ranting	11,28%
Kertas-Karton	11,06%
Plastik	19,74%
Logam	3,06%
Kain	2,54%
Karet-Kulit	2,18%
Kaca	2,42%
Lainnya	7.2%

Sumber: Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN), 2025

Berdasarkan data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) 2024 dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), plastik menjadi penyumbang sampah terbanyak kedua setelah sampah sisa makanan, dengan presentase 19,74%. Plastik sendiri menjadi unggulan karena memiliki sifat yang istimewa yaitu, mudah dibentuk sesuai dengan kebutuhan, memiliki berat yang ringan sehingga bisa menghambat biaya, tahan lama, aman dari kontaminasi kimia dan air, plastik sendiri aman sebagai kemasan barang maupun makanan, dan tahan terhadap cuaca dan suhu yang berubah, dan memiliki harga yang murah. (Verina, 2021). Keberadaan sampah plastik menjadi permasalahan pelik yang dialami oleh berbagai negara disleuruh dunia. tingkat pertumbuhan duduk yang cukup tinggi membuat angka penggunaan plastik terus meningkat setiap tahun nya. (Hakim, 2019). Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki populasi tinggi mencapai 270 juta jiwa, berikut data yang di dapatkan dari BPS.

Tabel 1.2 Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun

	2022	2023	2024
Indonesia	275 773,8	278 696,2	281.603,8

Sumber: <https://www.bps.go.id>, 2024

Tingkat pertumbuhan penduduk yang terus meningkat membuat angka penggunaan sampah terus meningkat pula setiap tahunnya (Hakim, 2019). Ini memicu produksi sampah seperti kantong plastik yang digunakan saat belanja, digunakan sebagai pembungkus makanan, menjadi wadah penyimpanan dan lain-lain. (Selke & Culture, 2016). Penggunaan plastik yang tinggi di masyarakat ini disebabkan karena plastik memiliki sifat yang fungsional dan memiliki biaya rendah dalam proses produksinya, sehingga dapat diproduksi secara massal dan sangat mudah untuk ditemukan (Wahyudin dan Afriansyah, 2020).

Beberapa negara termasuk Indonesia sampah plastik menjadi persoalan besar yang segera membutuhkan penanganan. Pemerintah, politis, serta masyarakat merasakan keprihatinan produksi sampah (Permana, Rizal & Hasan 2020). Sampah plastik memiliki dampak besar terhadap kerusakan lingkungan karena sifatnya yang sulit terurai. proses pembusukan sampah plastik dengan tanah membutuhkan waktu 100-500 tahun hingga akhirnya dapat terdekomposisi sempurna (Karuniastuti, 2012).

Indonesia sendiri telah memiliki Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Pada pasal 3 dijelaskan bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab mengelola sampah bersama-sama untuk dapat mewujudkan hak masyarakat terhadap lingkungan hidup yang baik dan sehat (Kristiawan, 2023).

Bertepatan pada tanggal 21 Februari 2016 Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Beracun Berbahaya (B3) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, memberlakukan Surat Edaran Nomor SE-06/PSLB3-PS/2015 yang berisi tentang kebijakan pemerintah dalam rangka pengurangan sampah, khususnya sampah plastik, dikarenakan paling banyak digunakan oleh masyarakat. Kebijakan kantong plastik berbayar ini dianggap berguna untuk menekan laju dari timbunan sampah kantong plastik yang selama ini menjadi beban pencemaran bagi lingkungan hidup.

Evaluasi peraturan pengendalian penggunaan plastik telah diterapkan, seperti Kota Banjarmasin. Kota Banjarmasin sendiri sejak 18 Maret 2016 telah memiliki Peraturan Walikota Banjarmasin No 18 tahun 2016 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik. Pelaksanaan Perwali tersebut telah berjalan secara efektif, meskipun masih terdapat kendala-kendala yang harus diperbaiki, seperti masyarakat yang masih keberatan untuk menggunakan kantong ramah lingkungan serta staff Badan Lingkungan Hidup yang masih sangat terbatas di dalam pelaksanaan kebijakan tersebut (Vikalista, 2018). Selanjutnya Kota Bogor yang juga telah menerbitkan Peraturan Walikota Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pelarangan Kantong Plastik.

Koordinasi yang cukup baik dilakukan dalam lingkup internal pemerintah Walikota ini. Namun, masih terdapat beberapa hambatan seperti jumlah staff yang masih terbatas serta terdapat masyarakat yang masih merasa keberatan terhadap penggunaan tas ramah lingkungan (Nurulhaq, Kismartini, Amirudin, 2020). Kemudian Kota Balikpapan yang juga telah menerapkan Peraturan Walikota No

8 Tahun 2018 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik yang dalam pelaksanaannya sudah cukup baik dengan melakukan sosialisasi dan pelatihan. Namun, dalam hal pengawasan masih kurang maksimal karena masih banyak pelaku usaha yang melakukan pelanggaran (Erwaningtyas, Irawan, Prakoso, 2020).

Kota Semarang merupakan ibu kota Provinsi Jawa tengah, memiliki jumlah timbulan sampah yang lebih tinggi dibandingkan dengan daerah-daerah lain di Jawa Tengah. Berikut adalah data timbulan sampah di Jawa Tengah pada tahun 2024 berdasarkan data dari KLHK.

Gambar 1.1 Grafik Timbulan Sampah di Jawa Tengah 2024



Sumber: Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN), 2025

Grafik di atas menggambarkan jumlah timbulan sampah di beberapa daerah di Jawa Tengah. Dari data yang disajikan, Kota Semarang, sebagai ibu Kota Jawa Tengah, mencatat timbulanan sampah tertinggi, yakni sebesar 434,243.97 ton. Angka ini menjadikan Kota Semarang sebagai daerah jumlah timbulan sampah tertinggi di Jawa Tengah. Kota Semarang telah memiliki Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah, namun regulasi tersebut

belum secara spesifik mengatur penanganan sampah plastik.

Sebagai langkah lanjutan, Pemerintah Kota Semarang menerbitkan Peraturan Walikota (Perwali) No. 27 Tahun 2019 tentang Pengendalian Penggunaan Plastik. Kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi 1) pencemaran lingkungan, 2) mengendalikan dampak perubahan iklim, 3) meningkatkan kesadaran masyarakat dalam perlindungan lingkungan, dan 5) menjamin keberlangsungan ekosistem dan pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang sehat (Perwali Semarang No. 27 Tahun 2019, Pasal (2)).

Sebagai pelengkap Perwali tersebut, Surat Edaran Walikota Nomor 660.1/4910 tentang Pengendalian Penggunaan Plastik diterbitkan untuk memperkuat upaya pengurangan kantong plastik sekali pakai di berbagai sektor, termasuk di kalangan pelaku usaha. Surat edaran ini menjadi instrumen penting dalam mengevaluasi implementasi kebijakan pengendalian plastik di Pasar Johar, Kota Semarang, terutama dalam menilai efektivitas penerapannya di tingkat pelaku usaha. Surat edaran ini menginstruksikan pelaku usaha dan masyarakat untuk kesadaran dan berpartisipasi aktif dalam mengurangi penggunaan plastik dengan membawa tas belanja sendiri serta beralih ke bahan alternatif yang lebih ramah lingkungan, seperti kertas atau anyaman, sebagai pembungkus barang dagangan. Namun, dalam praktiknya, tingkat kesadaran pelaku usaha masih menjadi tantangan utama, terutama dalam menyesuaikan diri dengan kebijakan ini serta menghadapi keterbatasan akses terhadap bahan pengganti plastik. Selain itu, dalam Perwali No 27 Tahun 2019 Pasal 5 Ayat 3 disebutkan bahwa pelaku usaha dilarang menyediakan kantong plastik, pipet minum plastik, serta Styrofoam,

sebagai upaya mendorong penggunaan alternatif yang lebih ramah lingkungan (Kristiawan, 2023). Kebijakan ini tidak hanya bertujuan menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan berkelanjutan, tetapi juga meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pengurangan sampah plastik dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan data dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang tahun 2022, jenis sampah anorganik yang paling banyak adalah sampah plastik karena bahan ini masih digunakan dalam kegiatan rumah tangga sehari-hari oleh masyarakat.

Tabel 1.3 Jumlah Plastik di Kota Semarang Tahun 2019-2022

Tahun	Jumlah
2019	78. 582,27 ton
2020	80.153,86 ton
2021	74.088,957 ton
2022	74.146,62 ton

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang, 2023

Berdasarkan tabel, jumlah sampah plastik di Kota Semarang bersifat naik turun. Peningkatan tertinggi terjadi pada tahun 2020. Namun pada tahun 2021 terjadi penurunan jumlah sampah plastik menjadi bukti yang baik Pemerintah Kota Semarang dalam pengelolaan sampah plastik. (Kristiawan, 2023).

Tabel 1.4 Komposisi Sampah Berdasarkan Jenis Sampah di Kota Semarang

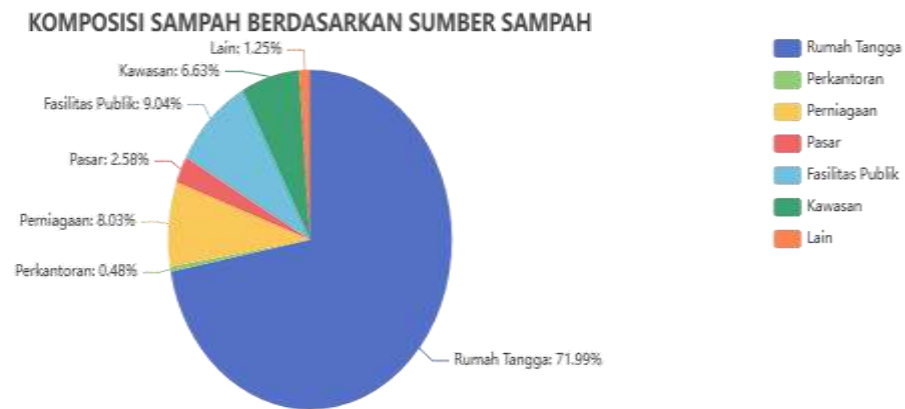
Jenis Sampah	Jumlah Sampah (%)
Sisa Makanan	60.8%
Kertas -Karton	10.2%
Plastik	17.2%
Logam	1.2%
Kain	4.9%
Karet-Kulit	1%

Kaca	1.8%
Lainnya	2.9%

Sumber: Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN), 2025)

Dari data KLHK di tahun 2024, jenis sampah plastik menduduki urutan ke-2 mencapai persentase 17,2% dengan jumlah timbunan terbanyak di Kota Semarang. Data dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang jenis sampah anorganik yang mendominasi adalah sampah plastik mengingat bahan tersebut secara masif digunakan dalam kegiatan rumah tangga sehari-hari masyarakat Kota Semarang (Kristiawan, 2023). Berdasarkan data tersebut penggunaan plastik masih sering digunakan oleh pelaku usaha dan masyarakat di Kota Semarang. Permasalahan mengenai sampah khususnya kantong plastik, telah menjadi perhatian, karena dampaknya juga yang sangat berbahaya. Kondisi ini di dukung dengan ketergantungan masyarakat dalam sifat konsumtif masyarakat dalam berbelanja menggunakan kantong plastik disebabkan oleh mudahnya mendapatkan kantong plastik. Hal ini disampaikan oleh (Adnyana Laksana, 2022). Bahwa tingkat ketergantungan masyarakat yang sangat tinggi terhadap pemakaian kantong plastik disebabkan oleh sifat plastik dalam penggunaannya. Penggunaan kantong plastik sekali pakai telah menjadi bagian integral dalam aktivitas perdagangan, termasuk di pasar-pasar tradisional. Namun, dampak negatifnya terhadap lingkungan tidak dapat diabaikan, mengingat kantong plastik sulit terurai dan berkontribusi terhadap pencemaran lingkungan di pasar-pasar Kota Semarang (Maulana, 2023).

Gambar 1.2 Sumber Sampah Plastik di Kota Semarang Tahun 2024



Sumber: Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN), 2025

Sumber sampah plastik dari pasar terlihat menyumbang 2,58%, pasar tetap menjadi salah satu sumber sampah plastik karena tingginya penggunaan kantong plastik sekali pakai dalam transaksi perdagangan. Dalam konteks evaluasi kebijakan pengendalian penggunaan kantong plastik tertuju di area Pasar Kota Semarang, data ini menunjukkan bahwa kontribusi sampah dari pasar memang relatif kecil dibandingkan dengan sumber lainnya. Namun, pasar tetap menjadi titik kritis dalam peredaran kantong plastik karena pola konsumsi masyarakat yang cenderung menggunakan kantong plastik sebagai pembungkus utama. Hal ini sesuai dengan temuan Muslim (2019) yang menyatakan bahwa kebijakan kantong plastik berbayar belum cukup efektif dalam mengubah perilaku masyarakat karena masih rendahnya kesadaran terhadap dampak lingkungan dari sampah plastik.

Selain itu data menunjukkan Tahun 2022 bahwa sekitar 25% sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Jatibarang berasal dari pasar tradisional. Hal ini menunjukkan bahwa pasar tradisional, termasuk Pasar Johar sebagai pasar

pusat terbesar di Kota Semarang yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, merupakan salah satu dari sumber sampah plastik, (Agus, 2022).

Penelitian mengenai kebijakan pengendalian penggunaan kantong plastik telah banyak dilakukan, namun sebagian besar masih berfokus pada efektivitas implementasi kebijakan secara umum, bukan pada evaluasi komprehensif di lingkungan pasar tradisional. Beberapa penelitian sebelumnya, seperti yang dilakukan oleh Rahmayani dan Aminah (2021), hanya menilai efektivitas kebijakan di sektor toko modern dan swalayan, tanpa membahas kondisi di pasar tradisional seperti Pasar Johar. Selain itu, penelitian oleh Afila et al. (2022) yang membahas monitoring kebijakan plastik juga belum mengeksplorasi kendala spesifik yang dihadapi oleh pelaku usaha di pasar.

Penelitian Akyas Aryan Permana et al. (2022) menyoroti bahwa meskipun regulasi terkait pengendalian kantong plastik telah diberlakukan di Kota Semarang, implementasinya belum berjalan optimal, terutama di sektor perdagangan tradisional. Salah satu kendala utama yang ditemukan adalah minimnya pengawasan terhadap pelaku usaha yang masih menggunakan kantong plastik, serta kurangnya fasilitas pendukung, seperti tempat sampah terpilah untuk mengelola sampah plastik dengan lebih baik. Sebagai *leading sector*, Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang bertanggung jawab dalam mengawasi dan memastikan kebijakan pengurangan plastik berjalan dengan baik. Pemerintah Kota Semarang menanggapi permasalahan ini dengan menerbitkan Peraturan Walikota (Perwali) Nomor 27 Tahun 2019 tentang Pengendalian Penggunaan Plastik yang bertujuan untuk membatasi penggunaan kantong plastik, terutama di

sektor perdagangan dan perbelanjaan (Vitaloka & Utaminingsih, 2023). Namun, kebijakan ini lebih banyak diterapkan di pusat perbelanjaan modern, restoran, dan minimarket, sedangkan penerapannya di pasar tradisional, termasuk Pasar Johar masih menghadapi berbagai tantangan. Meskipun Perwali No. 27 Tahun 2019 tidak secara spesifik menargetkan pasar tradisional, peran pasar dalam produksi sampah plastik tidak dapat diabaikan. Oleh karena itu, pemerintah berupaya menerapkan kebijakan ini dengan berbagai cara, seperti memberikan himbauan kepada pelaku usaha serta menyarankan penggunaan alternatif pembungkus ramah lingkungan, seperti kertas atau daun pisang (Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang, 2023).

Berdasarkan hasil kajian literatur di atas, merupakan hal yang menarik untuk menganalisis evaluasi kebijakan pengendalian penggunaan kantong plastik di Pasar Johar, Kota Semarang. Penelitian ini akan menghubungkan implementasi Perwali No. 27 Tahun 2019 dan Surat Edaran Walikota No. 660.1/4910 untuk menilai efektivitas kebijakan dalam konteks pasar tradisional serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi pelaku usaha dalam mengadaptasi kebijakan ini. berdasarkan hal tersebut, penelitian ini **berjudul "Evaluasi Kebijakan Pengendalian Penggunaan Kantong Plastik di Pasar Johar Kota Semarang"**.

1.2 Perumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang diatas maka beberapa permasalahan yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut :

1. Ketergantungan Pelaku usaha dan masyarakat terhadap pemakaian kantong plastik yang sulit di hilangkan.
2. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk membawa kantong belanja sendiri ke pasar.
3. Tidak adanya regulasi khusus untuk pasar tradisional menyebabkan penerapan kebijakan hanya bergantung pada surat edaran, sehingga sulit dijalankan oleh pelaku usaha di pasar.

1.2.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang telah dipaparkan diatas, maka penelitian ini bertujuan:

1. Bagaimana Pengendalian Penggunaan Kantong Plastik pada Pasar Johar Kota Semarang sesuai dengan surat edaran yang berlaku pada Peraturan Walikota Semarang No 27 tahun 2019 tentang Pengendalian Penggunaan Plastik?
2. Analisis pendukung dan penghambat dalam kebijakan pengendalian penggunaan kantong plastik pada Pasar Johar Kota Semarang?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang telah dipaparkan diatas, maka penelitian ini bertujuan:

1. Menjelaskan dan menganalisis mengenai pelaksanaan pengendalian penggunaan Kantong Plastik pada Pasar Johar Kota Semarang.
2. Mengidentifikasi dan menjelaskan faktor pendukung dan penghambat dalam kebijakan pengendalian penggunaan kantong plastik pada Pasar Johar Kota Semarang.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

1. Penelitian ini dapat diharapkan untuk memperluas substansi ilmu pengetahuan dan bermanfaat bagi perkembangan ilmu, khususnya dalam bidang administrasi publik.
2. Sebagai acuan referensi penelitian yang akan datang sehubungan dengan evaluasi kebijakan pengendalian penggunaan kantong plastik di Pasar Johar Kota Semarang.

1.4.2 Kegunaan Praktis

1. Bagi Penulis, penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu dan pengetahuan mengenai bagaimana evaluasi kebijakan dalam upaya pengendalian penggunaan kantong plastik di Pasar Johar Kota Semarang.
2. Bagi Universitas serta pihak akademisi, penulisan ini diharapkan dapat memperluas koleksi penelitian ilmiah untuk dapat dijadikan sebagai referensi pada penelitian selanjutnya.
3. Bagi Instansi Terkait, penelitian ini dilaksanakan dengan harapan dapat memberikan solusi dan pandangan yang berasal dari pihak di luar

organisasi terkait bagaimana kebijakan pengurangan sampah terhadap lingkungan hidup Kota Semarang. Adanya penelitian ini juga dapat memberikan informasi kepada pemerintah dalam membuat keputusan maupun kebijakan.

4. Bagi Pembaca, penelitian ini untuk pembaca dapat memperoleh pengetahuan tambahan terkait pengelolaan sampah serta kebijakan pengurangan sampah di Kota Semarang.

1.5 Kajian Teori

1.5.1 Penelitian Terdahulu

Tabel 1.5 Penelitian Terdahulu

No	Penulis/Tahun	Judul	Metode dan Teori Peelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan
1.	Chanidia Ari Rahmayani, aminah (2021)	Efektivitas pengendalian sampah plastik untuk mendukung kelestarian lingkungan hidup Kota Semarang	Metode penelitian ini menggunakan adalah yuridis normatif dengan menekan penelaahan dokumen-dokumen hukum dan studi pustaka. Teori yang digunakan menggunakan teori efektivitas kebijakan.	Guna pengendalian laju pertumbuhan semakin banyaknya sampah plastik di Kota Semarang, maka dikeluarkanlah regulasi Peraturan Walikota Semarang mengenai Pengendalian plastik, dalam keberjalanannya regulasi tersebut telah dipatuhi dan dilaksanakan dengan baik oleh para pelaku usaha toko modern dan swalayan, namun regulasi tersebut belum sepenuhnya dipatuhi dan dilaksanakan dengan baik oleh pelaku usaha restoran/rumah makan/cafe/penjual makanan di Kota Semarang	Penelitian ini berfokus terhadap efektivitas saja dalam pelaksanaan keberjalanan kebijakan di Kota Semarang, sedangkan peneliti berfokus terhadap evaluasi keijakan dalam pengendalian penggunaan kantong plastik di wilayah Pasar Johar, Kota Semarang.

2.	Riyana Afila, Kismartini, R. Slamet Santoso (2022)	Monitoring Kebijakan Penggunaan Plastik di Kota Semarang	Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Teori yang digunakan adalah teori fungsi monitoring menurut William Dunn.	Hasil penelitian adalah monitoring yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang telah berjalan dengan baik. Namun dalam kegiatan monitoring yang dilakukan belum tercapai semua sasaran kebijakan. Dari keempat fungsi monitoring menurut Dunn, fungsi kepatuhan masih belum terpenuhi. Hal ini dikarenakan belum adanya SOP yang diatur dan petugas yang belum melaksanakan sesuai dengan peraturan khususnya pada ketentuan penegakan sanksi.	Penelitian ini menggunakan teori fungsi monitoring menurut William Dunn sedangkan peneliti menggunakan teori evaluasi kebijakan William N Dunn dengan indikator yang berbeda yaitu efektifitas, efisiensi, kecukupan ketepatan, responsivitas, dan perataan
3.	Nada Zairina Wulandari dan Palupi Lindiasari Saputra (2022)	Evaluasi Kebijakan Pengurangan Penggunaan kantong Plastik di Kelurahan Kota Banjarmasin	Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan jenis penelitian survei pemakai melalui pengukuran Survei Kepuasan Masyarakat. Teori yang digunakan adalah evaluasi kebijakan menurut William Dunn.	Berdasarkan penelitian dengan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) di Kelurahan Basirih diketahui nilai indeks unit pelayanan adalah 2,45 dan hasil dari nilai interval konversi 61,49 yang berada antara 25,00 – 64,99 yang menunjukkan mutu tingkat pelayanan atau kinerja kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik adalah tidak baik atau tidak memuaskan.	Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan jenis penelitian survey pemakai melalui Survei Kepuasan Masyarakat, sedangkan peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif

4..	Muhammad Muslihun (2019)	Kajian lingkungan kebijakan kantong plastik berbayar di Kota Semarang	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data menggunakan observasi dan wawancara. Teori yang digunakan menggunakan implementasi kebijakan	Kebijakan dari kantong plastik berbayar telah mendapatkan dukungan dari pemerintah daerah, dengan segala upaya yang telah dilakukan sebagai bentuk dukungan untuk mengurangi timbunan sampah sesuai dengan kebijakan ini. Meskipun konsumen telah mengetahui serta mendukung kebijakan ini tetapi tidak banyak merubah perilaku konsumen, mereka masih terkesan acuh dalam menganggap sampah kantong plastik sebagai prioritas persampahan yang mendesak..	Perbedaan penelitian disini yaitu menggunakan Teori yang digunakan adalah teori implementasi kebijakan menurut George C. Edwards III sedangkan peneliti menggunakan teori evaluasi kebijakan William N Dunn (2003)
5.	Akyas Aryan Permana, Ahmad Taufiq, Puji Astuti, (2022)	Analisis implementasi pengelolaan dan pengendalian sampah plastik di Kota Semarang	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pengumpulan data menggunakan observasi, dokumentasi, dan wawancara. teori yang digunakan adalah teori implementasi kebijakan.	Implementasi dari Peraturan Walikota Semarang No 27 Tahun 2019 tentang pengendalian penggunaan plastik di Kota Semarang belum terlaksana dengan baik. Hal tersebut dibuktikan dengan dalam keberjalanan peraturan walikota tersebut, pemerintah Kota Semarang tidak menjatuhkan sanksi atau hukuman terhadap para pelanggar Sehingga produksi sampah di Kota Semarang pun tidak terkendali dan berkurang secara signifikan.	Perbedaan penelitian disini yaitu menggunakan Teori yang digunakan adalah teori implementasi kebijakan menurut George C. Edwards III sedangkan peneliti menggunakan teori evaluasi kebijakan William N Dunn (2003)

6.	Siti Shopiatul Islami, Irma Purnamasari, G.GorisSeran (2020)	Implementasi Kebijakan Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik di Kota Bogor	Penelitian ini menggunakan metode deksriptif kualitatif. Teori yang digunakan yaitu menggunakan teori dari Implementasi Kebijakan	Hasil penelitian implemntasi kebijakan ini di Kota Bogoro sudah baik. hal ini dikarenakan dari penerapan program berjalan sesuai aturan dan angka penurunan penggunaan kantong plastik yang signifikan. namun masih terdapat tantangan yaitu sangat rendahnya pemahaman masyarakat mengenai lingkungan.	Perbedaan dari penelitian ini yaitu pada lokus dan fokus yang digunakan yaitu menggunakan teori implementasi kebijakan, sedangkan peneliti menggunakan teori evaluasi kebijakan.
7.	Normajatun dan Abdul Haliq (2020)	Kebijakan Pemerintah Tentang Pengurangan Kantong Plastik di Pasar Tradisional Kota Banjarmasin	Peneltiian ini menggunakan Metode menggunakan metode kualitatif dan analisis deskriptif. Dan Teori yang digunakan yaitu menggunakan teori Implementasi Kebijakan	Hasil dari penelitian ini faktor komunikasi dilakukan dalam bentuk sosialisas kepada kelompok dagang, faktor sumberdaya dibagi menjadi tiga aspek: sumber daya manusia yang terlibat dalam kebijakan ini adalah Dinas Lingkungan Hidup,sumberdana bersumber dari APBD dan donatur pihak ketiga, serta sarana berupa kendaraan dinas, faktor disposisi para pelaksana sudah memiliki komitmen untuk melaksanakan tugas dengan baik, terakhir struktur birokrasi kegiatan sosialisasi pengurangan penggunaan kantong plastik sudah berpedoman pada SOP yang ada	Perbedaan dari penelitian ini terdapat\ pada fokus penelitian dan indikator yang digunakan. Penelitian tersebut, berfokus pada implementasi kebijakan dengan indikator komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi. Sedangkan penelitian ini berfokus pada evaluasi kebijakan menggunakan teori Dunn

8.	Yohanes Kopong Blolo (2021)	Implementasi kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik di Kota Denpasar	Penelitian ini menggunakan metode menggunakan metode kualitatif dan analisis deksriptif. Dan teori yang digunakan yaitu menggunakan Implementasi kebijakan.	Berdasarkan penelitian ini, Dinas Lingkungan Hidup Kota Denpasar selaku implementor telah melakukan komunikasi dan sosialisasi kebijakan ini. Komunikasi antar pelaksana kebijakan ini sangat baik dan kelompok sasaran mendukung adanya kebijakan ini sehingga pelaksanaannya lancar dan sesuai dengan yang diharapkan	Perbedaan dari penelitian ini berfokus kepada implementasi kebijakan penerapan perwali tersebut dan peneliti disini berfokus tertuju kepada evaluasi kebijakan dalam pelaksanaannya terhadap Surat edaran ataupun Perwali tersebut.
9.	Erwaningtyas, Irawan & Prakoso (2020)	Implementasi Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik di Kota Balikpapan	Penelitian ini menggnakan metode deksriptif kualitatif dengan menggunakan analisis model interaktif. Dan teori yang digunakan menggunakan Implementasi kebijakan	Implementasi Perwali No 8 Tahun 2018 tentang “Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik di Kota Balikpapan” telah berjalan dengan cukup baik dalam segi pembinaan melalui berbagai kegiatan sosialisasi dan pelatihan sudah berjalan cukup baik. Namun, dalam hal pengawasan masih berjalan kurang maksimal karena masih banyak pelaku usaha yang melakukan pelanggaran. Kemudian, dalam hal pemberian sanksi administratif sudah terlaksana sesuai dengan aturan yang ada	Perbedaan dari penelitian ini berfokus kepada implementasi kebijakan penerapan perwali tersebut dan peneliti disini berfokus tertuju kepada evaluasi kebijakan dalam pelaksanaannya terhadap Surat edaran ataupun Perwali tersebut

10.	Kristiawan, Yuwanto & Neny (2023)	Evaluasi Peraturan Walikota Semarang Nomor 27 Tahun 2019 Tentang pengendalian Penggunaan Plastik	Penelitian ini menggunakan metode menggunakan metode kualitatif dan analisis deksriptif. Dan teori yang digunakan yaitu menggunakan teori evaluasi kebijakan menurut, Dunn	Pelaksanaan Perwal ini masih banyak kekurangan yang ada. Pemerintah hanya melaksanakan satu pembinaan dari enam yang di amanatkan Perwal. Sosialisasi yang dilakukan juga hanya formalitas belaka dengan tidak diberikan pendampingan secara intensif, pengawasan lebih lanjut, dan solusi yang mutakhir kepada pelaku usaha serta masyarakat. hal ini dikarenakan Sumber Daya Manusia (SDM) dan anggaran yang terbatas	Perbedaan penelitian terletak pada pembahasan lokus yang di targetkan dalam penelitian ini memfokuskan secara umum dalam pelaksanaa Perwali No 27 Tahun 2019, namun untuk peneliti membahas dengan lokus khusus yaitu di area Pasar Johar Kota Semarang.
11.	Natasya & Weni (2023)	Implementasi Kebijakan Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik (studi Pada Pasar Wonokromo Kota Surabaya)	Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif . dengan menggunakan teori dari Donald Van Meter dan Carl Van Horn m	Hasil implementasi kebijakan menunjukan berjalan kuang maksimal hal ini karena sumber daya manusia sudah ada timnya pelaksana untuk kebijakan tersebut namun secara kualitas dan kuantitas kurang memadai, sumber daya finansialhanya tersedia dana untuk menggaji tim pelaksana tidak ada dana untuk sarana prasarana kegiatan yang lain ataupun dana untuk pengganti kantong plastik, sumber daya waktu juga kurang maksimal karena kurang intens nya tim pelaksana melakukan sosialisasi.	Perbedaan penelitian disini yaitu terdapat pada teori yang digunakan, penelitian ini menggunakn teori implementasi kebijakan sedangkan peneliti menggunakan teori evaluasi kebijakan. dan lokus yang digunakan penelitian juga berbeda.

Hasil penelitian terdahulu lebih menjelaskan mengenai pelaksanaan Peraturan Daerah mengenai kebijakan pengurangan plastik di beberapa kota Indonesia dan di luar negeri. Hasil penelitian terdahulu juga lebih melihat permasalahan sampah plastik berdasarkan dari sisi hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga yang menjadi perbedaan pada penelitian lalu dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah penelitian ini berfokus pada kegiatan evaluasi pelaksanaan kebijakan pengurangan sampah plastik khususnya pada pemakaian kantong plastik di Kota Semarang yang dilihat dari sudut pandang Kebijakan Publik dan menggunakan teori Evaluasi dengan indikator efektifitas, efisiensi, ketepatan, kecukupan, pemerataan dan responsivitas. Oleh karena itu diperlukan sebuah ide atau gagasan yang membuat penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Maka dapat disimpulkan bahwa penelitian yang berjudul Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pengendalian Penggunaan Kantong Plastik Oleh Pelaku Usaha di Pasar Johar, Kota Semarang belum pernah dilakukan.

1.5.2 Administrasi Publik

Administrasi secara etimologi berasal dari Bahasa Inggris yaitu *administration* atau *administear* yang berarti mengelola (*to manage*) atau mengegrakan (*to direct*). Administrasi dalam arti sempit yaitu kegiatan tata usaha seperti tulis menulis, surat menyurat. Pengertian administrasi secara luas menurut Siagian yang dikutip oleh Pasolong dalam bukunya Teori Administrasi Publik (2011:3) mengatakan: Administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang terlibat dalam suatu

bentuk usaha kerjasama demi tercapainya tujuan yang ditentukan sebelumnya. Gie yang dikutip oleh Pasolong dalam bukunya Teori Administrasi Publik (2011: 3) mengemukakan bahwa : Administrasi tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sehari-hari karena manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa bekerja sendiri serta membutuhkan orang lain dalam pencapaian tujuannya. Berdasarkan definisi diatas penulis dapat menyimpulkan administrasi sebagai suatu kegiatan kerjasama dua orang atau lebih dalam pencapain suatu tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Administrasi Publik menurut Chandler dan Plano dalam Keban (2008: 4) adalah proses dimana sumberdaya dan personel publik di organisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan dan mengelola (*manage*) keputusan-keputusan dalam kebijakan publik serta memberikan arah dan maksud terhadap usaha sejumlah orang. Keban menyatakan bahwa istilah Administrasi Publik menunjukkan bagaimana pemerintah menjalankan peran sebagai agen tunggal yang berkuasa atau sebagai regulator yang aktif dan inisiatif dalam mengatur dan mengambil langkah atau prakarsa, yang menurut mereka penting atau baik untuk masyarakat.

Ruang lingkup administrasi publik meliputi beberapa dimensi strategis yaitu (Keban, 2008 :11):

1. Dimensi Kebijakan: Dimensi kebijakan menyangkut proses pembuatan keputusan untuk penentuan tujuan dan cara atau alternatif terbaik untuk mencapai tujuan tersebut. Proses tersebut dapat dianalogikan dengan sistem kerja otak manusia dengan arahan atau

tujuan dari suatu tindakan.

2. Dimensi Organisasi: Berdasarkan dengan peraturan struktur dan hirarki yang meliputi pembentuk unit, pembagian tugas antar lembaga-lembaga publik, dan penetapan prosedur untuk mencapai tujuan organisasi. Proses ini dapat diumpamakan sebagai sistem organ tubuh manusia yang memiliki peran dan fungsi tersendiri dan siap melaksanakan tugasnya setelah mendapatkan perintah dari otak.
3. Dimensi Manajemen: Menyangkut proses bagaimana kegiatan-kegiatan yang dirancang sebelumnya dapat diimplementasikan (digerakan, diorganisir, dikontrol) demi mencapai tujuan organisasi melalui prinsip-prinsip tertentu.
4. Dimensi Moral atau Etika: Menjadi salah satu dimensi penting dalam administrasi publik karena setiap kegiatan administrasi publik berkenaan dengan maksud dan tujuan publik tertentu, diarahkan untuk memuaskan kepentingan publik dan dijalankan dengan kewajiban dan motif yang benar.
5. Dimensi Lingkungan: Dinamika atau perubahan dimensi internal administrasi publik seperti kebijakan, manajemen, organisasi, moral atau etika, dan kinerja dalam administrasi publik, dipengaruhi oleh dimensi eksternal yaitu lingkungan. Situasi lingkungan dapat dilihat dari sistem politik, ekonomi, sosial dan budaya suatu negara yang sangat berpengaruh bagi administrasi publik. Oleh sebab itu, kemampuan mengenal dan menyesuaikan diri terhadap lingkungan

menjadi hal yang krusial.

6. Dimensi Akuntabilitas Kerja: Kebijakan, organisasi dan moral perlu dijalankan secara profesional serta harus menyesuaikan dengan lingkungan agar dapat memenuhi tuntutan akuntabilitas yakni bahwa administrator yang telah dipercayakan sebagai pengemban kepercayaan publik harus melayani publik dalam bentuk kerja . Dimensi ini menggambarkan bukti nyata tentang kehadiran dan kegunaan riil dari administrasi publik dalam suatu negara.

Dalam beberapa hal berbeda pada penempatan pengertian administrasi perorangan. Dari beberapa pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa administrasi publik adalah suatu kegiatan yang dilakukan kelompok orang dalam lingkup pemerintahan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, menyangkut pelayanan kepada orang banyak dan kesejahteraan rakyat. Maka dari itu administrasi publik tumbuh menjadi sistem penyelenggaraan kebijakan publik dan semakin penting perannannya dalam proses kebijakan publik.

1.5.3 Paradigma Administrasi Publik

Suatu disiplin ilmu bisa ditelusuri perkembangannya melalui perubahan paradigma. Administrasi publik terus tumbuh mengikuti perkembangan zaman sehingga sampai saat ini terdapat enam paradigma Administrasi Publik yang berguna untuk memberi gambaran terkait perubahan - perubahan dan perbedaan dalam tujuan, teori dan metodologi atau dalam nilai-nilai yang menjadi dasar. Paradigma admnitrasi publik menurut Nicholas Henry (Syafiie,2006:27) sebagai berikut:

a. **Paradigma I** : Dikotomi Politik dan Administrasi (1900-1927)

Pada buku “*politics and Administration*” Frank J. Goodnow dan Leonard D.White. Goodnow memberikan pendapat bahwa pemerintah mempunyai dua fungsi berbeda.

Pertama ada fungsi politik yang berpusat pada pembuatan kebijakan sesuai kehendak rakyat. Kedua, fungsi administrasi yang lebih pada pemberian perhatian pada implementasi kebijakan. Paradigma ini memiliki implikasi bahwa administrasi dianggap sebagai sesuatu yang bebas nilai dan mengarah pada pencapaian nilai efisiensi dan ekonomi dan birokrasi pemerintahan. Paradigma ini lebih menekankan pada lokusnya, yaitu birokrasi pemerintahan. Sementara metode dan fokus yang ada kurang dibahas pada paradigma ini.

b. **Paradigma II** : Prinsip-Prinsip Administrasi (1927 -1937)

Fokus pada paradigma ini adalah prinsip-prinsip administrasi. Prinsip ini di dapat diterapkan dimana-mana yang meliputi *planning, organizing, staffing, directing, coordinating, reporting, budgeting*. Sementara lokus paradigma ini tidak jelas karena prinsip tersebut bisa diimplementasikan dimanapun. Tokoh yang mendukung paradigma ini antara lain Willaughby, Gullick dan Urwick, Taylor dan Fayol.

c. **Paradigma III** : Administasi Publik Sebagai Ilmu Politik (1950-1970)

Munculnya paradigma ini disebabkan oleh banyaknya kritik yang mempermasalahkan pemisahan antara politik dan administrasi. Kritik lain, yaitu terkait dengan prinsip administrasi yang dianggap tidak

konsisten sehingga tidak dapat diimplementasikan secara universal. Lokus administrasi publik berada pada birokrasi pemerintahan. Fokus pada paradigma ini tidak jelas karena prinsip administrasi publik punya banyak kekurangan. Tokoh pada paradigma ini yaitu, Herbert Simon, Morstein-Mars, John Gaus.

- d. **Paradigma IV** : Administrasi Publik sebagai Ilmu Administrasi (1956-1970)

Paradigma ini menitikberatkan bahwa administrasi publik fokus pada ranah prinsip-prinsip manajemen yang telah ada, kemudian dikembangkan lagi seperti perilaku organisasi, analisis sistem, riset operasi ataupun manajemen yang sudah maju. Lokus paradigma ini tidak jelas karena fokusnya dapat diterapkan ke dunia bisnis maupun administrasi publik.

- e. **Pardigma V**: Administrasi Publik Sebagai Administrasi Publik (1970- Sekarang)

Paradigma terakhir sudah dilengkapi dengan lokus dan fokus yang jelas. Fokus paradigma ini, yaitu teori organisasi, teori manajemen, dan kebijakan publik. sementara itu lokusnya adalah masalah-masalah yang berhubungan dengan kepentingan publik.

1.5.4 Kebijakan Publik

Ramlan Surbakti (dalam Mas Roro Lilik Ekowati, 2009: 1) mendefinisikan kebijakan publik sebagai kebijakan yang menyangkut masyarakat umum. Kebijakan publik ini adalah sebagian dari keputusan politik. Keputusan politik itu sendiri adalah keputusan yang mengingat pilihan terbaik dari berbagai bentuk alternatif mengenai urusan-urusan yang menjadi kewenangan pemerintah. Sedangkan Dye mengemukakan tentang kebijakan publik : “ *Public Policy is what ever governments choose to do or not to do*” yang menjelaskan bahwa kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan (Tahir, 2015: 25).

Dengan demikian kebijakan menurut Dye, adalah merupakan upaya untuk memahami hal-hal (Tahir, 2015: 25), sebagai berikut:

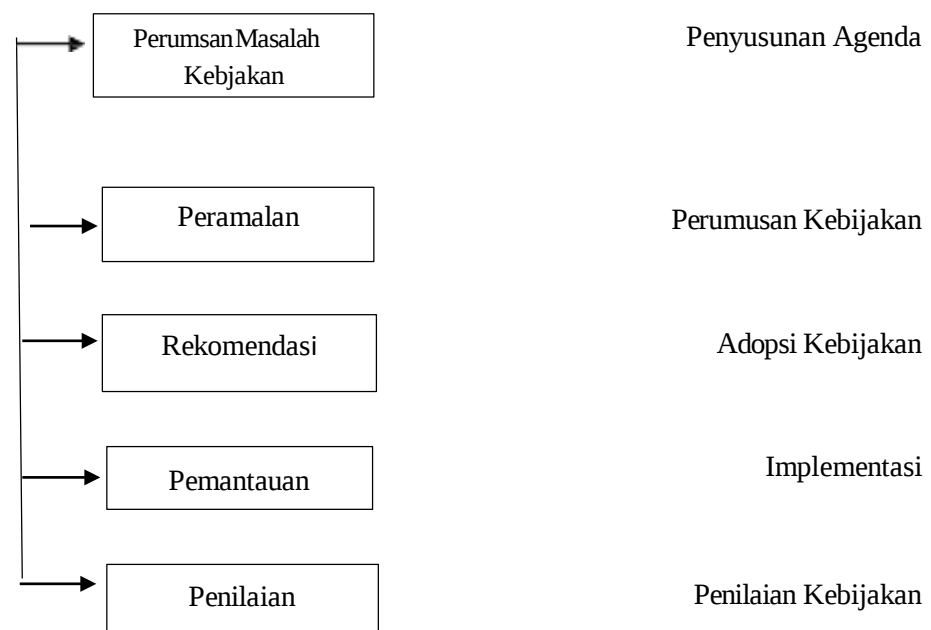
1. Apa yang dilakukan dan atau tidak dilakukan oleh pemerintah?
2. Apa penyebab atau yang mempengaruhinya?
3. Apa dampak dari kebijakan tersebut jika dilaksanakan atau tidak dilaksanakan?

Sementara itu William N. dunn menyebut istilah kebijakan publik sebagai pola ketergantungan yang kompleks dari pilihan-pilihan kolektif yang saling bergantung termasuk keputusan-keputusan untuk tidak bertindak, yang dibuat oleh badan atau kantor pemerintah (William N Dunn, 2003: 112). Sementara itu, James Enderson mendefinsikan kebijakan publik sebagai kebijakan yang ditetapkan oleh badan-badan dan aparat pemerintah (Soebarsono, 2005: 2).

Kebijakan publik memiliki proses secara bertahap yang mana kebijakan tersebut tidak langsung dilaksanakan, karena kebijakan publik melibatkan orang banyak dan memerlukan kajian yang mendalam. Proses pembuatan kebijakan publik merupakan proses yang kompleks karena melibatkan banyak proses maupun variabel yang harus dikaji dengan tahap-tahapan (Winarno, 2012: 35-36).

William N Dunn membagi proses kebijakan publik dalam lima tahap yaitu perumusan masalah kebijakan, peramalan, rekomendasi, pemantauan, dan penilaian sebagaimana dapat dilihat pada gambar dibawah ini :

Gambar 1.3 Proses Kebijakan Publik



Sumber: Winarno, 2012: 35

1. Tahapan Penyusunan Agenda

Para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda publi. Sebelumnya masalah-masalah ini berkompetisi terlebih dahulu untuk dapat masuk ke dalam agenda kebijakan. Pada akhirnya, beberapa masalah

masuk ke agenda kebijakan para perumus kebijakan. Pada tahap ini suatu masalah mungkin tidak disentuh sama sekali, sementara masalah yang lain ditetapkan menjadi fokus pembahasan, atau ada pula masalah karena alasan-alasan tertentu ditunda untuk waktu yang lama.

2. Tahap Formulasi Kebijakan

Masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah terbaik.

Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan (*policy alternatives/policy options*) yang ada. Sama halnya dengan perjuangan suatu masalah untuk masuk ke dalam agenda kebijakan, dalam tahap perumusan kebijakan masing-masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah. Pada tahap ini, masing-masing aktor akan “bermain” untuk mengusulkan pemecahan masalah terbaik.

3. Tahap Adopsi Kebijakan

Dari sekian banyak alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu dari alternatif kebijakan tersebut diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus antara direktur lembaga atau keputusan pengadilan.

4. Tahap Implementasi Kebijakan

Suatu program kebijakan hanya akan menjadi catatan-catatan elit, jika program tersebut tidak di implementasikan. Oleh karena itu, keputusan program kebijakan yang telah diambil sebagai alternatif pemecahan masalah terus diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah di tingkat bawah. kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasikan sumberdaya finansial dan manusia. Pada tahap implementasi ini berbagai kepentingan akan saling bersaing. beberapa implementasi kebijakan mendapat dukungan para pelaksana (implementators), namun beberapa yang lain mungkin akan di tentang oleh para pelaksana.

5. Tahap Evaluasi Kebijakan

Pada tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi, untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat telah mampu memecahan masalah. Kebijakan publik pada dasarnya dibuat untuk meraih dampak yang diinginkan. Dalam hal ini, memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat. Oleh karena itu, ditentukanlah ukuran-ukuran atau kriteria-kriteria yang menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakan publik telah meraih dampak yang diinginkan.

Berdasarkan proses kebijakan yang dikemukakan oleh William N Dunn dapat dilihat bahwa terdapat proses penilaian kebijakan atau evaluasi kebijakan. Proses tersebut akan dibahas lebih lanjut dan digunakan oleh peneliti sebagai alat untuk melakukan penilaian terhadap kebijakan

Pengendalian Penggunaan Kantong Plastik Oleh Pelaku Usaha di Pasar Johar Kota Semarang.

1.5.5 Evaluasi Kebijakan

Menurut Mohi dan Akbar (2018) evaluasi merupakan suatu mekanisme yang digunakan untuk merencanakan, memantau, dan meningkatkan kinerja pemerintah serta hasil-hasilnya. Hal ini bertujuan agar pejabat publik dapat mempertanggungjawabkan tindakan mereka dimasa depan dan menjalankantugasnya dengan efektif dan efisien. Menurut Nugroho (2014), tujuan utama dari evaluasi adalah untuk memahami pencapaian dan harapan dari kebijakan, bukan untuk menyalahkan. Evaluasi merupakan kegiatan yang bertujuan untuk mengamati dampak dari program atau pembuatan kebijakan.

Mengevaluasi suatu program atau kebijakan publik diperlukan adanya suatu kriteria untuk mengukur keberhasilan program atau kebijakan publik tersebut. Untuk dapat menghasilkan informasi mengenai kinerja kebijakan, perlu melakukan analisis menggunakan tolak ukur yang berbeda untuk mengevaluasi hasil kebijakan. Kriteria untuk evaluasi diterapkan secara *restrospektif* (ex-post).

Untuk menilai keberhasilan pelaksanaan suatu kebijakan perlu dikembangkan beberapa tolak ukur. mengenai kinerja kebijakan dalam menghasilkan informasi terdapat tolak ukur. Mengenai kinerja kebijakan dalam menghasilkan informasi terdapat tolak ukur evaluasi menurut William N Dunn (2003). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif maka pembahasan dalam penelitian ini berhubungan dengan pernyataan yang dirumuskan oleh William N Dunn di setiap kriterianya dijelaskan sebagai berikut :

1. Efektivitas mencakup pencapaian tujuan secara tepat sesuai dengan sasaran yang diinginkan dan kesesuaian kebijakan dengan tujuan dan perannya. Efektivitas juga terkait dengan hasil yang tercapai, menilai apakah hasil yang diharapkan telah terwujud karena adanya implementasi kebijakan.
2. Efisiensi menyangkut optimalisasi penggunaan sumber daya untuk mencapai hasil yang diinginkan. Efisiensi juga terkait dengan jumlah upaya yang diperlukan untuk mencapai Tingkat efektivitas tertentu.
3. Kecukupan merujuk pada kesesuaian antara kebijakan, program, dan regulasi yang ditetapkan dengan Kerjasama organisasi dalam mencapai tujuan. Kecukupan juga mengindikasikan seberapa efektif kebijakan dalam menangani masalah yang dihadapi.
4. Perataan adalah upaya untuk menyeimbangkan pencapaian hasil kebijakan diseluruh organisasi dan lingkungan, dengan mempertimbangkan tugas dan fungsi masingmasing. Ini melibatkan analisis untuk memastikan bahwa manfaat dari kebijakan telah didistribusikan secara merata kepada berbagai kelompok masyarakat.
5. Responsivitas mencakup kemampuan birokrasi untuk memahami dan merespon kebutuhan masyarakat, serta mengembangkan program-program sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi mereka. Responsivitas, juga terkait dengan Tingkat kepuasan dan pengetahuan masyarakat, terutama kelompok sasaran, terhadap kebijakan yang telah diterapkan.
6. Ketetapan merujuk pada kepastian dalam pelaksanaan kegiatan yang

diarahkan pada pencapaian tujuan pelaksanaan yang telah ditetapkan.

Ketetapan juga berhubungan dengan pertanyaan apakah tujuan kebijakan atau program tersebut sesuai untuk suatu masyarakat.

Dalam melakukan evaluasi kebijakan juga terdapat indikator atau kriteria yang digunakan untuk menilai kebijakan yang sedang dan sudah dilaksanakan. Menurut Bridgman & Davis (2000) pengyukuran evaluasi kebijakan publik secara umum mengacu pada empat indikator, yaitu:

1. Indikator *input* termasuk sumber daya manusia, anggaran dan infrastruktur pendukung.
2. Indikator proses mencakup bentuk pelayanan masyarakat serta efektivitas dan efesinesi dari metode yang digunakan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.
3. Indikator *output* termasuk tujuan dari kebijakan dan kesesuaian antara tujuan tersebut dengan hasil dari kebijakan publik.
4. Indikator *outcomes* mencakup dampak yang diterima oleh pihak yang terkena kebijakan baik bersifat positif ataupun negatif.

Berdasarkan teori model evaluasi kebijakan dalam penilaian implementasi terdapat dua teori dari Bridgman & Davis serta William Dun, kedua teori ini memiliki perbedaan dimana teori dari Dunn lebih lengkap dan spesifik di dalam melakukan evaluasi kebijakan, mengingat Dunn memiliki enam kriteria dalam melakukan evaluasi kebijakan. Sedangkan Bridgman & Davis hanya memiliki 4 indikator saja dalam mengevaluasi kebijakan. Namun, keduanya memiliki persamaan yaitu bertujuan untuk mengevaluasi kinerja dari kebijakan yang telah

ditetapkan, sehingga diharapkan dapat ditemukan langkah-langkah alternatif untuk menanggulangi kekurangan-kekurangan yang masih ada di dalam pelaksanaan kebijakan sebelumnya. Penulis akan menggunakan teori William Dun pada penelitian ini, hal ini disebabkan kriteria penilaian yang dimiliki Dunn dapat membawa penelitian ini lebih mendalam dan dapat memperoleh hasil yang lebih maksimal.

1.5.6 Sampah

1.5.6.1 Pengertian Sampah

Masalah lingkungan saat ini terjadi diberbagai tempat, terutama terkait dengan pencemaran, baik itu pencemaran tanah air, udara, maupun suara. Pencemaran ini disebabkan oleh aktivitas manusia. Misalnya, pencemaran tanah disebabkan oleh akumulasi sampah di tempat pembuangan sampah. Jika tidak segera ditangani dengan baik, hal ini dapat menyebabkan penurunan Kesehatan masyarakat. Sampah, yang merupakan limbah padat yang terdiri dari zat organik dan anorganik yang dianggap tidak berguna, harus dikelola dengan baik untuk mencegah bahaya terhadap lingkungan dan untuk melindungi investasi Pembangunan (SK SNI, 1990).

Menurut World Health Organization (WHO), sampah merujuk kepada benda-benda yang tidak digunakan, tidak dipakai, tidak disenangi, atau barang yang dibuang yang berasal dari aktivitas manusia dan tidak terjadi secara alami. Sesuai dengan Undang-Undang No 18 Tahun 2008 tentang “Pengelolaan Sampah”, sampah diartikan sebagai hasil sisa kegiatan sehari-hari manusia atau proses alam yang berbentuk padat atau semi padat, baik organik maupun

anorganik, yang cenderung terurai dan dianggap tidak lagi bermanfaat, kemudian dibuang ke lingkungan, Karden Eddy Sontang Manik (2003) menjelaskan smapah sebagai benda yang tidak digunakan atau tidak diinginkan dan harus dibuang yang dihasilkan dari aktivitas manusia.

1.5.6.2 Jenis-Jenis Sampah

Sampah terbagi menjadi beberapa jenis (Nugorho, 2013), yaitu :

- a. Berdasarkan sifatnya
 1. Sampah organik, yaitu sampah yang mudah membusuk seperti sisa makanan, sayuran, daun-daun kering, dan sebagainya. Sampah-sampah ini dapat diolah lebih lanjut seperti dijadikan kompos.
 2. Sampah anorganik, adalah sampah yang tidak dapat terurai dengan sendirinya, seprti plastik wadah pembungkus makanan, kertas, botol dan juga gelas minuman, kaleng, kayu, dan sebagainya. Sampah organik dapat dijadikan sampah komersil atau sampah yang laku bila dijual untuk dijadikan produk lain.
- b. Berdasarkan bentuknya
 1. Sampah padat, seperti sampah dapur, sampah kebun, plastik, gelas, dan lain-lain. Menurut bahannnya sampah ini dikelompokkan menjadi sampah organik dan nonorganik.
 2. Sampah cair adalah bahan cairan yang telah digunakan dan tidak diperlukan kembali dan dibuang ke tempat pembuangan sampah.

Menurut Sejati (2000) jenis sampah dibedakan menjadi tiga golongan yaitu :

1. Sampah organik atau basah, merupakan sampah yang dihasilkan dari manusia, hewan dan tumbuhan yang dapat mengalami proses pembusukan.
2. Sampah anorganik atau kering, sampah kering merupakan sampah yang dihasilkan dari kegiatan manusia secara alami terdegradasi atau hasil dari pembuatan manusia
3. Sampah berbahaya, sampah yang dihasilkan dari barang-barang berbahaya yang mengandung zat-zat yang dapat menyebabkan kerusakan jika digunakan lagi dan perlu penanganan lebih lanjut.

Dari beberapa pendapat tentang jenis-jenis sampah, maka dapat disimpulkan bahwa sampah memiliki beberapa jenis seperti :

1. Sampah organik, sampah yang dapat membusuk, sampah organik terdiri dari bahan basah yang tidak tahan lama dan cepat membusuk. Sampah organik berasal dari makanan, daun keringm sayuran, kotoran hewan.
2. Sampah anorganik, jenis sampah yang tidak dapat membusuk. Misalnya, botol kaca, plastik termasuk kantong plastik, besi berkarat.

1.5.6.3 Dampak Sampah

Sampah juga berdampak terhadap lingkungan, baik ekosistem perairan maupun ekosistem darat. Badan Lingkungan Hidup Daerah Kab. Tanjab Barat (2017) mengatakan ada beberapa dampak dari sampah, yaitu :

1. Sampah terhadap ekosistem perairan

Sampah dibedakan menjadi sampah organik dan sampah non organik. Pada sampah organik dapat menjadi makanan untuk ikan dan makhluk hidup lainnya, tetapi sampah juga dapat mengurangi kadar oksigen dalam lingkungan perairan. Sedangkan untuk sampah anorganik dapat mengurangi sinar matahari yang masuk ke dalam lingkungan perairan. Akibatnya, proses esensial dalam ekosistem seperti fotosintesis menjadi terganggu.

2. Dampak sampah terhadap ekosistem daratan.

Sampah yang dibuang ke dalam ekosistem darat dapat mengundang organisme tertentu untuk datang dan berkembangbiak. Organisme yang biasanya memanfaatkan sampah tersebut seperti tikus, lalat, dan lain-lain.

3. Dampak sampah terhadap kesehatan.

Sampah yang dapat menumpuk akan menarik organisme seperti lalat, tikus, kecoa yang dapat menyebabkan penyakit, potensi bahaya kesehatan yang dapat ditimbulkan seperti :

- a. Penyakit diare, kolera, tifus dan demam berdarah yang menyebar dengan cepat karena virus yang berasal dari sampah dengan pengelolaan yang tidak tepat dapat bercampur dengan air minum.
- b. Penyakit jamur dapat juga menyebar (misalnya jamur kulit)
- c. Sampah beracun.

1.5.7 Sampah Plastik

Sampah plastik merupakan bahan buatan yang tersusum dari bahan-bahan kimia yang berbahaya bagi lingkungan. Sampah plastik dapat berbahaya bagi lingkungan jika digunakan dalam batasan yang tidak wajar (wahyono dan Sudarno, 2012). Menejemen pengelolaan sampah plastik, mulai dari tingkat rumah tangga hingga skala kota yang dikelola oleh pemerintah setempat, sangat penting. Untuk mempermudah pengelolaan sampah plasik ditingkat rumah tangga, diperlukan pemahaman tentang jenis-jenis plastik, bahan-bahannya, dan dampaknya terhadap lingkungan, sehingga dapat dikembangkan manajemen pengelolaan yang efektif. Membuang sampah plastik ke tepat pembuangan akhir (TPA) tidaklah menjadi solusi yang bijak, Meskipun demikian, peran pemulung dalam mengurango akumulasi sampah plastik layak dihargai, walupun tidak dapat sepenuhnya menghiangkan jumlah sampah plastik yang ada.

Material plastik, yang mulai dikembangkan secara luas dan digunakan pada abad ke-20 telah mengalami pertumbuhan penggunaan yang signifikan. Pada tahun 1930-an penggunaanya hanya mencapai beberapa ratus ton, tetapi meningkat pesat menjadi 150 juta ton per tahun pada tahun 1990-an, dan mencapai 220 juta per tahun pada tahun 2005. Plastik dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu *thermoplastic* dan *thermosetting*. *Thermoplastic* adalah jenis plastik yang dapat meleleh saat dipanaskan pada suhu tertentu dan dapat dibentuk menjadi bebrbagai bentuk. Sementara itu, *thermosetting* adalah jenis plastik yang setelah di padatkan, tidak dapat meleleh kembali meskipun dipanaskan (Surono, 2013).

Sampah plastik merujuk pada bahan yang tidak memiliki nilai atau tidak digunakan dalam produksi atau penggunaan barang, biasanya karena cacat selama proses manufaktur, kelebihan bahan, atau limbah. Ini merupakan barang yang tidak berguna lagi bagi pemiliknya atau pengguna awalnya (Tanjung, 2018).

1.5.7.1 Dampak Sampah Plastik

Sampah plastik merupakan ancaman serius bagi lingkungan karena jumlahnya yang terus meningkat. Kantong plastik, sebagai salah satu jenis sampah plastik, sulit terurai oleh proses alam dan menjadi salah satu sumber pencemar.

Menurut Ditjen PPKL-Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sampah plastik memiliki beberapa dampak yang signifikan. Jika dibakar secara terbuka, sampah plastik dapat menyebabkan polusi udara yang berpotensi menimbulkan penyakit serius seperti kanker dan gangguan kulit. Selain itu, sampah plastik juga dapat mencemari berbagai saluran air irigasi. Sungai, danau, Pantai, dan tanah. Bukti menunjukkan bahwa sampah plastik dapat menyumbat saluran air atau sungai yang pada akhirnya dapat mengakibatkan banjir.

1.5.7.2 Pengelolaan Sampah Plastik

Adapun beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mengelola sampah plastik yaitu dengan cara 3 R (*Raise, Reduce, Recycle*). (Purwaningrum, 2016) :

- a. *Reuse*, menggunakan kembali barang-barang yang terbuat dari plastik
- b. *Reduce*, mengurangi pembelian atau penggunaan barang-barang dari plastik, terutama untuk barang-barang sekali pakai.
- c. *Recycle*, mendaur ulang barang yang terbuat dari plastik.

1.5.8 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelaksanaan Kebijakan

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori model pelaksanaan kebijakan yang dikembangkan oleh George C. Edwards III dengan menamakan model pelaksanaan kebijakan publiknya dengan *Direct and Indirect Impact on Implmentation* (Agustino, 2016: 149-154).

Model pelaksanaan kebijakan terdapat empat variabel yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan yakni dapat sebagai faktor pendorong dan penghambat pelaksanaan kebijakan sebagaimana dijelaskan berikut ini;

a. Komunikasi

Variabel pertama mempengaruhi keberhasilan suatu pelaksanaan kebijakan menurut George C. Edwards III adalah komunikasi. Komunikasi, menurutnya sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari pelaksanaan kebijakan publik. Pelaksanaan kebijakan yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Pengetahuan atas apa yang akan mereka kerjakan dapat berjalan apabila komunikasi berjalan dengan baik, sehingga setiap keputusan kebijakan dan peraturan pelaksanaan kebijakan harus dikomunikasikan kepada bagian personalia yang tepat. Selain itu, kebijakan yang dikomunikasikan pun harus tepat, akurat, dan konsisten. Komunikasi diperlukan agar para pembuat keputusan dan para pelaksana akan semakin konsisten dalam melaksanakan setiap kebijakan yang akan diterapkan dalam masyarakat.

b. Sumber Daya.

Sumber daya merupakan hal penting lainnya dalam pelaksanaan kebijakan, menurut George C. Edwards III terdapat indikator sumber daya terdiri dari beberapa elemen, yaitu:

1. Sumber daya manusia, merupakan sumber daya utama dalam pelaksanaan kebijakan. Kegagalan yang sering terjadi dalam pelaksanaan kebijakan salah satunya disebabkan oleh SDM yang tidak mencukupi, memadai, ataupun tidak kompeten dibidangnya.
2. Anggaran, Sumber daya anggaran merupakan salah satu elemen penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Anggaran berperan dalam mendukung berbagai aspek pelaksanaan kebijakan, termasuk pembiayaan operasional, penyediaan fasilitas, pengadaan sumber daya manusia, serta pelaksanaan sosialisasi dan pengawasan.
3. Fasilitas, fasilitas fisik juga merupakan faktor penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan, tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) maka pelaksana kebijakan tersebut sulit untuk berhasil.

c. Disposisi (Sikap Pelaksana)

Menurut George C. Edwards III, variabel disposisi (sikap pelaksana kebijakan) mengacu pada kesiapan, kesediaan, dan komitmen para pelaksana dalam menerapkan suatu kebijakan, Disposisi mencerminkan pemahaman, dukungan, serta tingkat kepatuhan

pelaksana terhadap kebijakan yang telah ditetapkan. Jika pelaksana kebijakan memiliki sikap yang positif, seperti kesadaran akan pentingnya kebijakan dan proaktif dalam implementasi, maka kebijakan cenderung lebih efektif dijalankan.

Sebaliknya, jika terdapat resistensi, ketidakpahaman, atau kurangnya komitmen, maka implementasi kebijakan akan mengalami hambatan, seperti lemahnya pengawasan atau tidak konsistennya penegakan aturan.

d. Struktur Birokrasi

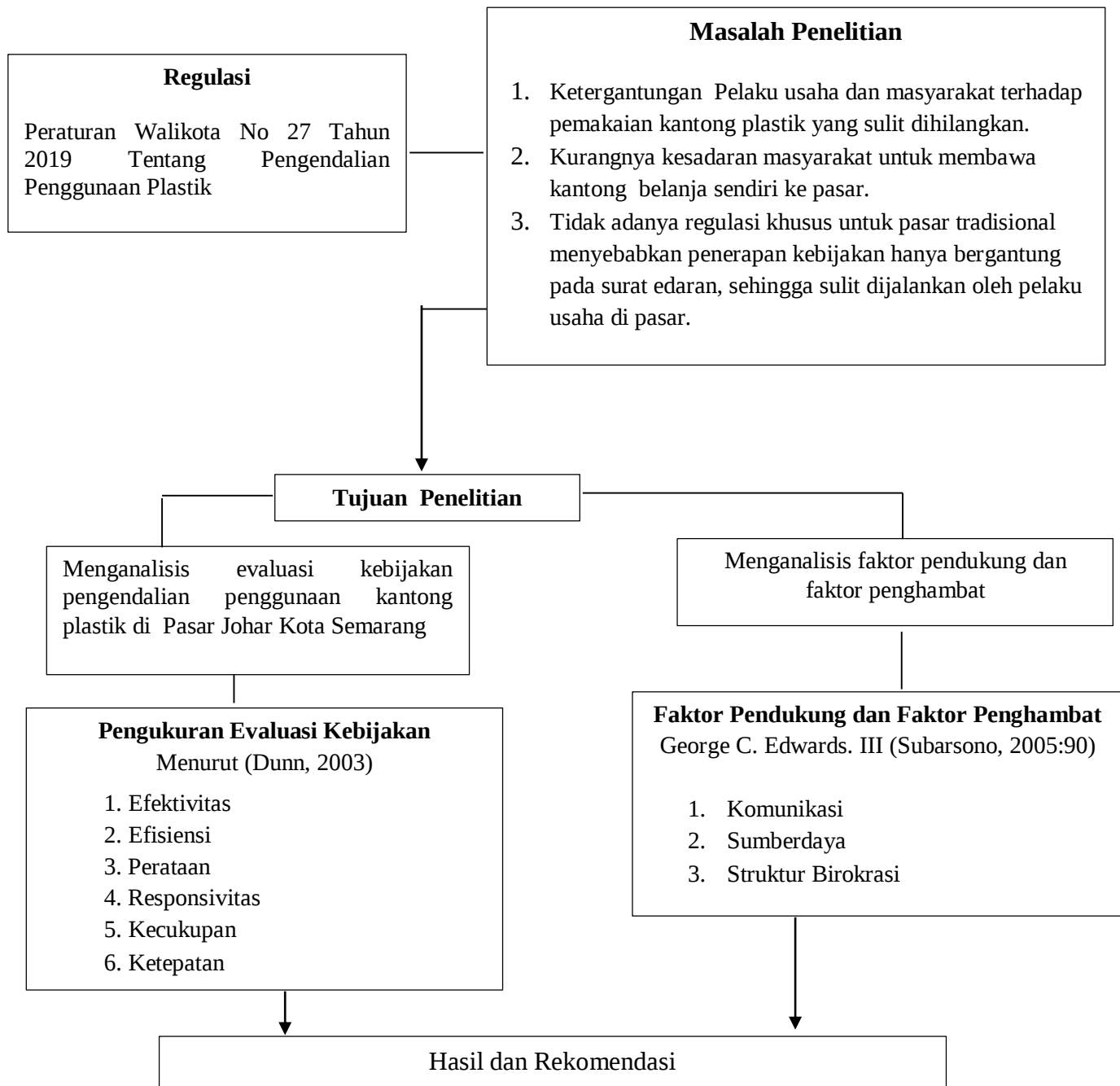
Menurut George C. Edwards III, yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan publik adalah struktur birokrasi. Walaupun sumber daya untuk melaksanakan suatu kebijakan tersedia, atau para pelaksana kebijakan mengetahui apa yang seharusnya dilakukan, dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan suatu kebijakan, kemungkinan kebijakan tersebut tidak dapat dilaksanakan atau direalisasikan karena terdapatnya kelemahan dalam struktur birokrasi. Kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerja sama banyak orang, ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia, maka hal ini akan menyebabkan sumber daya menjadi tidak efektif dan menghambat jalannya kebijakan. Birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi dengan baik.

Dua karakteristik, menurut George C. Edwards III, yang dapat mendorong kinerja struktur birokrasi/organisasi kearah yang lebih baik, yaitu dengan melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. *Standar Operating Prosedures* (SOPs), suatu kegiatan rutin yang memungkinkan para pegawai (atau pelaksana kebijakan, administraor, birokrat) untuk melaksanakan kegiatan-kegiatannya setiap hari sesuai dengan standar yang ditetapkan atau stadar minimum yang dibutuhkan.
- b. Fragmentasi, upaya penyebaran tanggungjawan kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktvitas pegawai diantara beberapa *unit* kerja.

1.6 Kerangka Berpikir

Gambar 1.4 Kerangka Pikir



1.7 Operasionalisasi Konsep

Operasionalisasi konsep dalam penelitian ini merujuk pada Evaluasi Kebijakan Pengendalian Penggunaan Kantong Plastik Oleh Pelaku Usaha di Pasar Johar Kota Semarang dan dilibatkan dengan ekplansi konsep teorits yang dipilih oleh peneliti selaku asas untuk menelaah permasalahan. Hal tersebut di analisis menggunakan operasional konsep dan indikator, antara lain :

- a. Evaluasi Kebijakan Pengendalian Penggunaan Kantong Plastik Oleh Pelaku Usaha di Pasar Johar Kota Semarang.

Untuk menilai keberhasilan atau gagalnya pelaksanaan kebijakan memerlukan beberapa tolak ukur atau kriteria untuk dapat mengevaluasi kebijakan. Menurut William N Dunn dalam mengevaluasi pelaksanaan kebijakan mencakup enam tolak ukur sebagai berikut:

1. Efektivitas

Efektivitas mengarah untuk menilai apakah kebijakan Perwali No 27 Tahun 2019 yang dilakukan telah mencapai hasil dan telah memenuhi standar pencapaian indikator-indikator keberhasilan seperti, tujuan/sasaran dari kebijakan Pengendalian Penggunaan Kantong Plastik Oleh Pelaku Usaha yang telah dilakukan di Pasar Johar. Adapun hasil yang diharapkan dapat dinilai melalui yaitu:

- a. Tercapainya tujuan kebijakan Pengendalian Penggunaan Kantong Plastik di Pasar Johar.
- b. Tercapainya kesesuaian dalam tujuan kebijakan Pengendalian Penggunaan Kantong Plastik di Pasar Johar.

2. Efisiensi

Efisiensi mengarah pada jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektifitas tertentu. Efisiensi dapat dinilai melalui :

- a. Kesesuaian waktu, yaitu lama waktu yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kebijakan Perwali No 27 Tahun 2019 di Pasar Johar.
- b. Sumber Daya, yang dapat dilihat berdasarkan Pemanfaatan Sumber Daya Manusia yang dilibatkan dan Sumber Daya Biaya atau Anggaran, yaitu dikeluarkan dalam pengawasan dan penegakan Peraturan Pengendalian Penggunaan Kantong Plastik di Pasar Johar.

3. Kecukupan

Dalam penelitian, kecukupan mengarah pada sejauh kebijakan pengendalian penggunaan kantong plastik di Pasar Johar yang dibuat oleh aparaturnya pemerintah dapat mengatasi berbagai permasalahan sampah plastik dan lingkungan di Pasar Johar yang dilihat dari indikator sebagai berikut:

- a. Kecukupan anggaran dan sumber daya manusia yang diberikan dan dilibatkan dalam merealisasikan kebijakan di Pasar Johar.
- b. Terpenuhinya fasilitas dalam rangka memfasilitasi kebutuhan dalam mengimplementasi kebijakan Perwali No 27 Tahun 2019 di Pasar Johar.
- c. Sistem pengawasan yang dilakukan oleh aparaturnya pemerintah terkait dalam penegakan kebijakan.

4. Perataaan

Dalam penelitian, pemertaan dimaksudkan demi mewujudkan keadilan yang seimbang bagi para pihak terkait, dengan indikator sebagai berikut:

- a. Kesamarataan atau keadilan dalam jenis manfaat yang diperoleh oleh pelaku usaha dan mendapatkan akses yang setara terhadap manfaat kebijakan.

5. Responsivitas

Dalam penelitian ini, responsivitas mengarah pada seberapa jauh pelaksanaan kebijakan Pengendalian Penggunaan plastik di Pasar Johar Kota Semarang dapat terlaksana dengan baik, indikator dari responsivitas yaitu:

- a. Tanggapan terkait dengan respon pengetahuan terhadap kebijakan Perwali No 27 Tahun 2019 oleh pelaku usaha dan konsumen di Pasar Johar .

6. Ketepatan

Dalam penelitian, ketepatan yang dimaksud yaitu berhubungan dengan rasionalitas substantif yang merujuk pada nilai atau harga diri tujuan kebijakan dan kepada kuatnya sumbu yang melandasi tujuan kebijakan tersebut. Terdapat indikator ketepatan yaitu:

- a. Pelaksanaan Pembinaan berupa penyampaian informasi kebijakan pengendalian penggunaan kantong plastik.
- b. Ketepatan kesadaran diri pelaku usaha dan masyarakat dalam merealisasikan kebijakan di Pasar Johar.

b. Faktor Pendorong dan Penghambat Kebijakan Pengendalian Penggunaan Kantong Plastik Oleh Pelaku Usaha di Pasar Johar Kota Semarang.

Untuk dapat mengetahui keberhasilan pelaksanaan kebijakan, perlu dilakukannya identifikasi dan analisis terhadap faktor yang mempengaruhi kebijakan baik sebagai faktor pendorong maupun faktor penghambat dalam mewujudkan keberhasilan kebijakan Pengendalian Penggunaan Kantong Plastik oleh pelaku usaha di Pasar Johar, Kota Semarang. Menurut George C Edwards III, terdapat empat variabel yang menjadi tolak ukur untuk melihat keberhasilan dari kebijakan sebagai berikut:

1. Komunikasi, mensyaratkan bahwa implementor mengetahui dan memastikan bahwa arus komunikasi kepada target group tersampaikan. Hal ini akan mencegah dan mengurangi distorsi implementasi.
2. Sumber daya, membahas mengenai penunjang keberhasilan implementasi kebijakan. Yang meliputi sumber daya manusia, (kompetensi implementor) dan sumber daya non manusia (finansial dan fasilitas).
3. Struktur birokrasi, yakni semua institusi atau organisasi yang terlibat dalam pelaksanaan Peraturan Walikota Semarang Nomor 27 tahun 2019.

Karena struktur birokrasi memiliki pengaruh yang signifikan dalam implementasi kebijakan. Selanjutnya Edward mengemukakan bahwa struktur birokrasi terdapat aspek *Standars Operating Procedures* (SOP) dan fragmentasi.

1.8 Argumen Penelitian

Diketahui jumlah penduduk Kota Semarang yang mencapai 1,6 juta jiwa dan akan terus meningkat dapat menyebabkan penuntutan infrastuktur sarana dan prasarana. Dengan jumlah penduduk yang banyak akan menyebabkan terjadinya peningkatan jumlah usaha sejenis industri, rumah makan, dan pasar tradisional yang akan menimbulkan beberapa permasalahan yang salah satu permasalahannya mengenai jumlah timbulan sampah. Timbulan sampah di Kota Semarang diprediksi akan semakin meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk Kota Semarang. Berdasarkan data yang diperoleh, timbulan sampah terbanyak berasal dari sisa makanan dan sampah plastik, sampah plastik menjadi permasalahan serius karena plastik sangat sulit untuk diurai oleh alam.

Kota Semarang menghadapi tantangan dalam pengelolaan sampah khususnya dalam pengendalian sampah plastik. Sehingga perlu dilakukan berbagai upaya untuk mengatasinya dengan cara melaksanakan evaluasi kebijakan dalam pengendalian penggunaan sampah plastik khususnya pada kantong plastik dengan baik. Evaluasi kebijakan mengenai pengendalian penggunaan kantong plastik di Pasar Johar masih ditemukan permasalahan, seperti masih banyak pelaku usaha yang menggunakan kantong plastik, minimnya partisipasi masyarakat dan pelaku usaha serta penggunaan plastik yang semakin kencang, dimana hal ini dapat menimbulkan timbulan sampah plastik semakin meningkat.

Hal tersebut dapat menyebabkan pencemaran lingkungan. Penelitian ini dapat dipergunakan sebagai bahan evaluasi dan pertimbangan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) serta pemerintah lainnya untuk menentukan langkah selanjutnya

dalam melakukan pengendalian penggunaan kantong plastik di pasar tradisional Kota Semarang, serta memastikan keberhasilan kebijakan yang diterapkan sehingga ini bisa menjadi tuntutan bagi pemerintah daerah khususnya Dinas Lingkungan Hidup agar sampah plastik di Kota Semarang dapat dikendalikan dan dioperasikan dengan baik dan dijalankan sesuai regulasinya.

1.9 Metode Penelitian

1.9.1 Tipe Penelitian

Metode yang digunakan yaitu metode kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui apa yang dirasakan oleh subjek penelitian (Lexy J. Moleong, 2007)

Pasolong dalam Metode Penelitian Administrasi Publik (2012:75) memaparkan sejumlah tipe yang terdapat di dalam penelitian, yakni:

a. Penelitian Deskriptif (Penggambaran)

Diartikan sebuah penelitian dengan melakukan penggambaran terhadap kondisi yang terjadi ketika penelitian berlangsung. Dalam tipe ini dilaksanakan upaya dalam menggambar, membuat sebuah catatan, melakukan penganalisaan, serta penginterpretasian ke dalam situasi saat ini. dengan diterapkannya tipe penelitian ini, peneliti bertujuan untuk mendapatkan sejumlah informasi aktual dan meninjau hubungan diantara variabel terkait. Di dalam penelitian ini tidak dilaksanakan pengujian terhadap hipotesa melainkan memaparkan ke dalam bentuk informasi yang bernilai obyektif.

b. Penelitian Eksploratif (Penjajakan)

Ialah sebuah penelitian yang memiliki sifat terbuka, lalu mengeksplorasi dan tidak memiliki hipotesa, pengetahuan dalam melangsungkan penelitian terkait gejala yang hendak diteliti masih sangatlah kurang sehingga penelitian jenis ini kerap diterapkan sebagai langkah awal dalam melangsungkan penelitian deskriptif. Dengan mengeksplorasikan seluruh informasi, maka permasalahan yang diangkat ke dalam penelitian dapat dirumuskan dengan jauh lebih mendetail.

c. Penelitian Explanatory (Penjelasan)

Ialah sebuah penelitian yang dimana pendeskripsianya berfokus terhadap keterkaitan antar variabel yang terdapat di dalam penelitian dan melangsungkan pengujian terhadap hipotesa yang telah dirumuskan atau *testing research*.

Sesuai dengan pemaparan di atas, maka desain penelitian yang diterapkan oleh peneliti ke dalam penelitian ini ialah penelitian kualitatif deskriptif yang dimana penelitian ini akan memperoleh data yang berupa deskriptif atau dalam bentuk tulisan (tidak menggunakan angka atau statistika) yang dimana data-data tersebut berdasarkan keterangan yang diungkapkan oleh pihak-pihak yang diamati. Dengan menerapkan metode kualitatif penelitian ini dilaksanakan secara alamiah sehingga hasil yang diperoleh mempresentasikan data yang peneliti temukan melalui observasi. Pemilihan desain penelitian ini disebabkan keinginan

peneliti untuk melangsungkan penganalisaan sekaligus pendeskripsian terhadap evaluasi kebijakan pengendalian penggunaan kantong plastik pada Pasar Johar Kota Semarang.

1.9.2 Lokasi dan Situs Penelitian

Menurut (Moleong, 2018) lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian terutama dalam menangkap fenomena yang terjadi dari objek yang diteliti untuk menghasilkan data yang akurat. Penetapan lokasi penelitian ialah step yang terpenting saat melangsungkan penelitian dengan tipe kualitatif. Hal ini dikarenakan melalui penetapan lokasi dilangsungkannya penelitian, maka objek serta tujuan dilangsungkannya penelitian dapat ikut ditetapkan.

Fokus penelitian ini adalah evaluasi pelaksanaan pengendalian penggunaan kantong plastik di Pasar Johar Kota Semarang. Sehingga lokus penelitian dilakukan di Pasar Johar Kota Semarang khususnya pelaku usaha Pasar Johar Semarang. Kota Semarang dipilih karena merupakan salah satu kota yang telah memiliki kebijakan tentang pengendalian penggunaan plastik, selain itu Kota Semarang merupakan kota yang memiliki jumlah sampah terbanyak di Jawa Tengah. Pasar Johar dipilih menjadi lokus penelitian karena termasuk dalam pasar tradiisonal terbesar di Kota Semarang dan banyak pelaku usaha disana yang masih menggunakan media kantong plastik sebagai transaksi jual-beli.

1.9.3 Subjek Penelitian

Menurut Arikunto (2011) subjek penelitian merupakan batas atau garis yang digunakan peneliti dalam menentukan benda atau orang sebagai titik

lekatnya variabel penelitian. Subjek penelitian berkaitan dengan informan yang memberikan informasi berguna dalam menjawab rumusan masalah yang telah ditentukan. Penulis menggunakan *purposive sampling* sebagai pengambilan sampel. Model *purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel probabilitas yang dilakukan dengan pertimbangan tertentu yang telah dilakukan sebelumnya (Sugiyono, 2019). Teknik *purposive sampling* dipilih untuk mendapatkan informasi yang rinci dari subjek penelitian agar relevan dengan topik yang dipilih. Subjek dari penelitian ini adalah pihak-pihak yang ikut ambil andil dalam evaluasi kebijakan pengendalian penggunaan kantong plastik pada Pasar Johar Kota Semarang, para pegawai di Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang.

Tabel 1.6 Purposive Sampling

No.	Informan	Keterangan	Jumlah
1.	Staff Bidang 4 DLH Kota Semarang	Pelaksana Kebijakan	1 Orang
2.	Sekretaris Dinas Perdagangan Kota Semarang	Pelaksana Kebijakan	1 Orang
3.	Koordinator Pengelola Wilayah Pasar Johar	Penerima Kebijakan	1 Orang
4.	Pelaku Usaha Besar Pasar Johar	Penerima Kebijakan	1 Orang
5.	Pelaku Usaha Besar Pasar Johar	Penerima Kebijakan	1 Orang
6.	Pelaku Usaha kecil Pasar Johar	Penerima Kebijakan	1 Orang
7.	Masyarakat/Pembeli	Penerima Kebijakan	2 Orang

Sumber: data yang dikelola oleh penulis

1.9.4 Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah berupa kata-kata, gambar dan bukan angka (Moleong, 2013:11). Dalam penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti berperan sebagai instrumen itu sendiri.

Data berupa data pernyataan yang menggambarkan dan mempresentasikan mengenai bagaimana Evaluasi Kebijakan Pengendalian Penggunaan Kantong Plastik Oleh Pelaku Usaha di Pasar Johar Kota Semarang. Adapun data yang dikumpulkan berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, foto, dokumen pribadi dan dokumen-dokumen resmi lainnya.

1.9.5 Sumber Data

Dalam penelitian ketersediaan sumber data menjadi salah satu pertimbangan untuk memilih fenomena atau masalah yang akan diteliti. Sumber data yang dimaksud dalam hal ini merupakan informasi darimana data diperoleh. Menurut (Moleaong dalam Sandu & Sodik, 2015) sumber data utama dalam penelitian kualitatif mencakup tampilan yang berupa kata-kata tertulis maupun tidak tertulis, yang selanjutnya adalah data pendukung seperti misalnya dokumen dan lain sebagainya.

Sumber data menurut Sugiyono (2009:137) ialah semua hal yang bernilai informatif bagi kelangsungan penelitian terkait data penelitian. Sesuai dengan sumber data, maka dikelompokkan menjadi:

- a. Data primer adalah sebuah sumber data yang dimana diperoleh secara langsung kepada pihak yang mengumpulkan data. Menurut Sugiyono (2018:456) data primer yaitu sumber data yang langsung memberikan kepada pengumpul data. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan. Umumnya jenis data ini didapatkan melalui kegiatan wawancara kepada sejumlah sumber terpercaya

- b. Data sekunder adalah suatu sumber data yang dimana perolehannya secara tidak langsung, contoh melalui perantara pihak ketiga atau berdasarkan penganalisisan dokumen yang telah tersedia.
- c. Data sekunder yang dikumpulkan oleh peneliti ialah undang-undang tentang pengelolaan sampah, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan daerah, peraturan walikota/bupati, artikel, jurnal, serta literatur yang berkaitan dengan penelitian yang tengah dilangsungkan.

1.9.6 Teknik Pengumpulan Data

Menurut Pasolong dalam Metode Administrasi Publik (2012:75) dengan menghimpun data primer maka data yang sekiranya dibutuhkan untuk melangsungkan penelitian dapat terkumpul dengan baik:

- a. Teknik Wawancara

Menurut Pasolong, wawancara ialah aktivitas yang dimana terdapat dua belah pihak yaitu pihak yang mengajukan pertanyaan dan pihak yang memberikan jawaban yang kemudian disebut sebagai informan atau narasumber. Dalam melangsungkan wawancara dapat dilakukan dengan dua cara yaitu secara langsung maupun tidak langsung.

- b. Teknik Pengamatan/Observasi

Pasolong mengatakan bahwa observasi ialah sebuah kegiatan dalam melangsungkan pengamatan secara langsung dan sistematis terhadap sejumlah gejala yang hendak dilangsungkan penelitian. Apabila sesuai dengan tujuan dilangsungkannya penelitian, sesuai dengan apa yang direncanakan oleh peneliti dan pencatatan yang sistematis.

c. Teknik Dokumentasi

Dokumen ialah rentetan kejadian yang tercatat, tergambar, ataupun terekam. Dengan melakukan pengkajian terhadap dokumen, maka seluruh data penelitian yang diperoleh melalui aktivitas pengobservasian dan wawancara dapat diperlengkap dengan menggunakan data yang tersedia di dalam dokumen yang dikaji.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan melakukan wawancara mendalam (indepth interview) dengan pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang bidang Pengawasan dan Pemberdayaan Lingkungan. Menurut Afifudin (2009:131) wawancara adalah metode pengambilan data dengan menanyakan sesuatu kepada seseorang yang menjadi informan atau responden. Selain wawancara, peneliti juga menggunakan observasi (pengamatan) dan dokumentasi.

1.9.7 Analisis dan Interpretasi Data

Analisis data ini bertujuan untuk mengendalikan data agar lebih sistematis dan tetap sesuai dengan rumusan masalah yang ada. Terdapat tiga tahapan dalam menganalisis data sesuai yang dijelaskan oleh Miles dan Huberman dalam (Sugiyono, 2017: 247) yaitu:

a. Reduksi Data

Melihat banyaknya data yang diperoleh maka perlu melakukan reduksi data yang berfungsi untuk memilih, merangkum, dan memfokuskan kepada hal-hal pokok agar dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai informasi terkait permasalahan yang terjadi di lapangan.

b. Penyajian Data

Penyajian data berupa teks naratif dimana akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi dan dapat memudahkan dalam pengambilan kesimpulan dari data yang diperoleh saat wawancara dan studi pustaka.

c. Menarik Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dilakukan dengan meninjau kembali catatan di lapangan berdasarkan hasil wawancara dari informan, kemudian ditarik kesimpulan sesuai dengan permasalahan, data, dan tujuan peneliti.

Dalam hal mereduksi data mengenai pelaksanaan evaluasi kebijakan pengendalian penggunaan kantong plastik pada Pasar Johar, Kota Semarang. Sedangkan dalam penyajian data yaitu mendeskripsikan tentang evaluasi kebijakan pengendalian penggunaan kantong plastik pada Pasar Johar Kota Semarang. Terakhir dalam penarikan kesimpulan dalam penelitian ini untuk menjawab rumusan masalah.

1.9.8 Kualitas Data

Kualitas data sangat diperlukan dalam penelitian, karena kualitas data menunjukan apakah terdapat persamaan antara data yang dicantumkan peneliti dengan data di lapangan. Kualitas data atau yang biasa disebut validitas data merupakan bentuk pertanggungjawaban peneliti atas data yang dilaporkan. Kualitas data merupakan keakuratan antara apa yang terjadi di lapangan dengan apa yang dicantumkan oleh peneliti. Dengan demikian, data tersebut dapat dikatakan benar apabila hanya terdapat sedikit perbedaan antara data yang dicantumkan peneliti dengan data yang sebenarnya terdapat di lapangan

(Sugiyono, 2008:267) Teknik yang digunakan peneliti adalah triangulasi. Teknik triangulasi merupakan cara untuk memeriksa keabsahan data dengan menggunakan sesuatu selain data tersebut untuk melakukan pembenaran atau membandingkan dengan data tersebut (Lexy J Moleong, 2006:330). Sugiyono (2008:274) membedakan triangulasi menjadi tiga bagian, antara lain:

- a. Triangulasi sumber: uji kredibilitas data dilaksanakan dengan cara mengecek data yang didapat dari berbagai sumber.
- b. Triangulasi teknik: uji kredibilitas data yang dilakukan dengan memeriksa data dengan teknik yang berbeda kepada sumber yang sama.
- c. Triangulasi waktu: pengambilan data yang disesuaikan dengan situasi penyedia informasi tersebut.

Dalam penelitian evaluasi kebijakan pengendalian penggunaan kantong plastik di Pasar Johar, Kota Semarang menggunakan ketiga gabungan triangulasi. Sebab dalam penelitian ini kedepannya peneliti akan menerapkan beberapa teknik pengumpulan data seperti wawancara, observasi, dan studi dokumentasi dengan mengecek data lalu menguji